



**BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Buton adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015 sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

Pasal 3





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 2 MARET 2015

**BUPATI BUTON,**



| PEJABAT      | PARAF   |
|--------------|---|
| SEKDA        |  |
| ASISTEN II   |  |
| KA. BAPPEDA  |  |
| KASAG. HUKUM |  |

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

Lampiran : Peraturan Bupati Buton  
 Nomor : 4 Tahun 2015  
 Tanggal : 2 MARET 2015  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015.

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB |
|--|---|--------|----------------------|
| 1  | 2   | 3      | 4                    |
| Meningkatnya kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau | Pendidikan Anak Usia Dini (%)                     | 70,45  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A (%)         | 100    | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi sekolah SD/MI (%)               | 100    | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)     | 98,21  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)   | 99,84  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)               | 23     | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)  | 94,96  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi kasar SMP/MTs/paket B (%)       | 99     | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)    | 94,85  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)             | 100    | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%) | 98,97  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)             | 56     | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C (%)    | 99     | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)    | 82,06  | Dinas Pendidikan     |
|  | Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK (%)          | 99     | Dinas Pendidikan     |

| SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB                       |
|--|---|--------|--|
| 1  | 2   | 3      | 4  |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA / paket C (%)          | 98,97  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)                            | 96     | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)                                 | 99,39  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)               | 76,6   | Dinas Pendidikan                           |
|  | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (%)                          | 83,31  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka melek huruf (%)   | 94,85  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) | 55,91  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka rata-rata lama sekolah (%)                                    | 7,10   | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka Kelulusan (AK) SD/MI*   | 99,82  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs*                                       | 96,05  | Dinas Pendidikan                           |
| Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga | Rasio jumlah lapangan olahraga per kecamatan*                       | 13,00  | Dinas Pendidikan                           |
|  | Jumlah organisasi kepemudaan*                                       | 43     | Dinas Pendidikan                           |
|  | Jumlah kegiatan Kepemudaan*   | 65     | Dinas Pendidikan                           |
| Meningkatnya minat baca masyarakat         | Jumlah pengunjung perpustakaan                                      | 19.386 | Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan |
| Meningkatnya kualitas kehidupan beragama   | Rasio tempat ibadah (Mesjid)  | 1,21   | Sekretariat Daerah                         |
|  | Rasio tempat ibadah (Gereja)  | 0,02   | Sekretariat Daerah                         |
|  | Rasio tempat ibadah (Pura)  | 0,02   | Sekretariat Daerah                         |

| SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB |
|---|---|--------|----------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                    |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 KH)                               | 977,00 | Dinas Kesehatan      |
|   | Angka usia harapan hidup (Thn)  | 72     | Dinas Kesehatan      |
|   | Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita (%)          | <15    | Dinas Kesehatan      |
|   | Menurunnya angka kematian bayi (AKB/1.000 KH)                             | 23     | Dinas Kesehatan      |
|   | Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH)                            | 102    | Dinas Kesehatan      |
|   | Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH                           | 20     | Dinas Kesehatan      |
|   | Menurunnya angka kematian balita (AKABA/1.000 KH)                         | 20     | Dinas Kesehatan      |
|   | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (ICU) (%)             | 100    | Dinas Kesehatan      |
|   | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)                | 100    | Dinas Kesehatan      |
|   | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare (%)                       | 90     | Dinas Kesehatan      |
|   | Annual Parasite Incidence (API) Per 1.000 Penduduk                        | < 1,0  | Dinas Kesehatan      |
|   | Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas(%) | 67     | Dinas Kesehatan      |
|   | Angka penggunaan tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)(%)*              | 45     | RSUD                 |
|   | Angka rata-rata lama perawatan atau length of stay (LOS)(Hari)*           | 5,5    | RSUD                 |

| SASARAN STRATEGIS                              | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB                        |
|--|--|--------|---|
| 1  | 2  | 3      | 4   |
|  | Angka selang waktu antara penggunaan tempat tidur atau Turn over internal (TOI)(Hari)*   | 7      | RSUD  |
|  | Frekuensi pemakaian tempat tidur atau bed turn over internal (BTO) (berapa kali)*  | 28     | RSUD  |
|  | Angka kematian netto (Net death rate/ NDR) (%)*  | 1      | RSUD  |
|  | Angka kematian umum gross death rate (GDR) (%)*  | 1      | RSUD  |
|  | Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (Menit)*   | ≤ 10   | RSUD  |
|  | Kematian pasien di UGD(kurang atau sama dengan 8 jam)(per 1000)*   | ≤ 2    | RSUD  |
| Menurunnya jumlah masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)   | 62,0   | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) | 60     | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)   | 78     | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Jumlah anak terlantar yang dibina (Orang)  | 70     | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap (%)  | 100    | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Persentase konflik sosial yang ditangani (%)   | 75     | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |



| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>SKPD PANAGGUNG JAWAB</b>                 |
|--|--|---------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                                    |
| Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja             | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)  | 47            | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)  | 43            | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)   | 95            | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif (%)   | 51            | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Transmigran swakarsa (%)   | 100           | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  | Persentase transmigrasi umum yang berhasil (%)   | 100           | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dan kesetaraan gender | Jumlah Ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha pertahun (Orang)  | 241.148       | BKKBD dan PP                                |
|  | Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan          | 1             | BKKBD dan PP                                |
|  | Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun (Kasus)  | 0             | BKKBD dan PP                                |
|  | Jumlah perkawinan dengan istri dibawah 16 tahun per tahun (Orang)  | 1.358         | BKKBD dan PP                                |
|  | Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda (Orang)   | 195           | BKKBD dan PP                                |
|  | Persentase Camat Perempuan (%)   | 0             | BKKBD dan PP                                |
|  | Persentase perempuan sebagai pengurus partai politik / anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Buton (Orang) | 3             | BKKBD dan PP                                |
|  | Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (Orang)   | 2.887         | BKKBD dan PP                                |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB                       |
|--|---|--------|--|
| 1  | 2   | 3      | 4  |
| Meningkatnya kualitas hidup anak   | Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun   | 5      | BKKBD dan PP                               |
|  | Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun (Kasus)  | 0      | BKKBD dan PP                               |
|  | Jumlah persentase anak (<1 tahun) diimunisasi per tahun (%)                                   | 100    | BKKBD dan PP                               |
| Meningkatnya SDM melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali                 | Prevalensi peserta KB aktif (%)   | 73     | BKKBD dan PP                               |
|  | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Jumlah)                                      | 48.956 | BKKBD dan PP                               |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan   | Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (%)  | 57,38  | Dinas Pekerjaan Umum                       |
|  | Jembatan dalam kondisi baik (M')  | 800    | Dinas Pekerjaan Umum                       |
|  | Panjang jalan kota/jumlah penduduk (%)  | 28     | Dinas Pekerjaan Umum                       |
|  | Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan Air (minimal 1,5 M) (%) | 3,8    | Dinas Pekerjaan Umum                       |
|  | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                           | 66,40  | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
| Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan | Tersedianya Perda RT/RW   | 0      | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |
|  | Tersedianya dokumen RDTR (Dok)  | 0      | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |
|  | Tersedianya dokumen RTBL (Dok)  | 0      | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |
|  | Ketaatan terhadap RTRW (%)  | 75,05  | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | SKPD PANAGGUNG JAWAB                  |
|---|---|---------|---------------------------------------|
| 1   | 2   | 3       | 4                                     |
|   | Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD (ada/tdk)                                       | ada     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|   | Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD (ada/tdk)                                       | ada     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|   | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD (ada/tdk)  | ada     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|   | Penjabaran program RPJMD dalam RKPD (ada/tdk)   | 90      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|   | Jumlah dokumen hasil litbang bidang pemerintahan, politik, ekososbud, keu dan SDA (Dok) | 9       | Badan Penelitian dan Pengembangan     |
| Meningkatnya sarana prasarana pertanian                   | Rasio panjang irigasi dalam kondisi baik (%)  | 0,50    | Dinas Pekerjaan Umum                  |
|   | Luas irigasi dalam kondisi baik (%)   | 55,7    | Dinas Pekerjaan Umum                  |
| Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan | Cakupan pelayanan irigasi yang teraliri sawah (Ha)                                      | 1.678   | Dinas Pekerjaan Umum                  |
|   | Rumah tangga pengguna air bersih (%)  | 70      | Dinas Pekerjaan Umum                  |
|   | Persentase rumah tangga bersanitasi (%)   | 75,3    | Dinas Pekerjaan Umum                  |
|   | Persentase rumah layak huni (%)   | 90      | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat |
|   | Persentase rumah tangga/keluarga berumah tidak layak huni (%)                           | 10      | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat |
|   | Persentase rumah tangga mendapat aliran listrik (%)                                     | 60      | Dinas Pertambangan                    |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan        | Persentase kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan (%)                                  | 100     | Dinas Perhubungan                     |
|   | Jumlah uji KIR Angkutan Umum (Jumlah Angkutan Umum)                                     | 2360,00 | Dinas Perhubungan                     |
|   | Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan (%) :                       |         | Dinas Perhubungan                     |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB                       |
|---|---|--------|--|
| 1   | 2   | 3      | 4  |
|   | - Quarail   | 79,69  | Dinas Perhubungan                          |
|   | - Rambu perintah Tabel IIB  | 70     | Dinas Perhubungan                          |
|   | - Rambu peringatan Tabel 1  | 84     | Dinas Perhubungan                          |
|   | - Rambu larangan Tabel IIA  | 60     | Dinas Perhubungan                          |
|   | - Rambu petunjuk Tabel III  | 72     | Dinas Perhubungan                          |
|   | - Deliniator  | 60     | Dinas Perhubungan                          |
|   | Persentase pemenuhan kebutuhan terminal Type B yang representatif (Jumlah Terminal) | 1      | Dinas Perhubungan                          |
|   | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (Jumlah Pelabuhan Laut)                    | 68     | Dinas Perhubungan                          |
|   | Rasio ijin trayek (Jumlah Izin Trayek )   | 1.182  | Dinas Perhubungan                          |
| Meningkatnya pemanfaatan ruang yang baik                              | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)                          | 30     | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |
|   | Persentase ruang terbuka hijau yang fungsional (%)                                  | 30     | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat      |
|   | Persentase ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan perkotaan (%)                    | 32,28  | Badan Pengelola Lingkungan Hidup           |
| Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan penanganan persampahan | Persentase penanganan sampah (%)  | 45     | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
|   | Tempat pembuangan sampah (TPS) / 1000 penduduk                                      | 250    | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>SKPD PANAGGUNG JAWAB</b>         |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                            |
| Meningkatnya pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana | Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran (%)  | 100           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|   | Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran (%) | 7             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|   | Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana alam (%)      | 7             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Meningkatnya pengelolaan potensi SDA secara lestari                               | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) (%)                           | 18            | Dinas Kehutanan                     |
|   | Kerusakan kawasan hutan (Ha) (%)                                       | 0,013         | Dinas Kehutanan                     |
|   | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB                              | 386.552       | Dinas Kehutanan                     |
|   | Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)           | 100           | Badan Pengelola Lingkungan Hidup    |
| Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan                    | Konsumsi ikan (%)  | 79,80         | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
|   | Persentase peningkatan produksi perikanan (%)                          | 3,1           | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
|   | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB                              | 376,45        | Dinas Kelautan dan Perikanan        |
| Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UMKM  | Persentase Koperasi aktif (%)  | 96            | Dinas Koperasi dan UKM              |
|   | Usaha mikro dan kecil (%)  | 100           | Dinas Koperasi dan UKM              |
|   | Persentase peningkatan SHU (%)   | 30            | Dinas Koperasi dan UKM              |
|   | Persentase Peningkatan UMKM (%)  | 15            | Dinas Koperasi dan UKM              |
|   | Persentase UMKM yang dibina (%)  | 30            | Dinas Koperasi dan UKM              |
|   | Persentase UMKM non BPR/LKM UKM (%)                                    | 240           | Dinas Koperasi dan UKM              |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     | SKPD PANAGGUNG JAWAB                |
|--|---|------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                                   |
| Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan   | Produtivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar | 38,28      | Dinas Pertanian                     |
|  | Produksi Peternakan ( Ekor/Thn)                                       | 76         | BP4K2P                              |
|  | Produksi daging ternak (Kg)   | 343.633    | Dinas Pertanian                     |
|  | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB                             | 22,87      | Dinas Pertanian                     |
|  | Regulasi Ketahanan Pangan (ada/tdk)                                   | ada        | BP4K2P                              |
|  | Ketersediaan pangan utama (Ton)                                       | 453,42     | BP4K2P                              |
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Mineral dan Air   | Pertambangan tanpa ijin (Ha)  | 33         | Dinas Pertambangan dan Energi       |
|  | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB                          | 12,5       | Dinas Pertambangan dan Energi       |
| Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif | Rasio desa berlistrik (%)   | 81         | Dinas Pertambangan dan Energi       |
|  | Rasio elektrifikasi (%)   | 77         | Dinas Pertambangan dan Energi       |
| Meningkatnya industri perdagangan usaha industri kreatif   | Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)                           | 18         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Persentase IKM produktif (%)  | 100        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Persentase jumlah IKM yang dibina (%)                                 | 20,83      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)*                        | 110.500,08 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Rp)*                     | 315,530,27 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB  |
|---|--|--------|---|
| 1   | 2  | 3      | 4   |
| Meningkatnya jumlah investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah | Lama Proses Perizinan  | 2      | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
|   | Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan (%)  | 100    | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
|   | Jumlah perda yang mendukung iklim usaha  | 8      | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
|   | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA/ PMDN (milyar rupiah)   | 5 M    | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
|   | Nilai Investasi PMA (milyar rupiah)  | 0      | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
|   | Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)   | 5 M    | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap |
| Meningkatnya Kepariwisataaan Daerah                                       | Kunjungan wisatawan (Jumlah)   | 600    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |
|   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB   | 0,1    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |
|   | Persentase promosi budaya Untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik (%) | 0      | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |
|   | Persentase sarana pada obyek wisata*   | 0,6    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |
| Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal      | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)  | 30,91  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |
|   | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Berapa Kali )  | 10     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                 |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>SKPD PANAGGUNG JAWAB</b>                            |
|---|--|---------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>   |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                         | Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan                        | 243           | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    |
|   | Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih*                       | 46            | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    |
|   | Persentase LPM berprestasi (%)   | 5             | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    |
|   | Persentase PKK aktif (%)   | 100           | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa    |
| Meningkatnya poleksosbud kamtibmas perlindungan serta kedisiplinan masyarakat | Rasio bangunan Ber-IMB (%)   | 6,63          | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat                  |
|   | Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk                          | 38            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |
|   | Persentase pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa (per tahun) | 34/34         | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |
|   | Angka kriminalitas (%)*  | 87            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |
|   | Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk                             | 60            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |
|   | Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan (%)                         | 3             | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |



| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b>  | <b>SKPD PANAGGUNG JAWAB</b>                 |
|--|---|----------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>       | <b>4</b>                                    |
| Meningkatnya kesadaran politik masyarakat  | Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)*  | 17             | Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik |
|  | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu/ pilkada (%)  | 80,12          | Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik |
|  | Jumlah orang asing yang terpantau*  | 2404           | Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik |
| Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan (%)                                  | 13,00          | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat         |
|  | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya) (%) | 3,43           | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat         |
|  | Persentase pegawai sesuai kompetensi jabatan (%)  | 100            | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat         |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah  | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah  | WTP            | Badan Pengelola Keuangan Daerah             |
|  | Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)  | 39,04          | Badan Pengelola Keuangan Daerah             |
|  | Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)  | 45,9           | Badan Pengelola Keuangan Daerah             |
|  | Rasio efisiensi belanja (%)   | 10             | Badan Pengelola Keuangan Daerah             |
|  | Meningkatnya PAD  | 23.176.883.617 | Dinas Pendapatan Daerah                     |
|  | Peningkatan proporsi PAD dibandingkan Total Pendapatan (%)  | 110            | Dinas Pendapatan Daerah                     |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>SKPD PANAGGUNG JAWAB</b>                |
|--|--|---------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                                   |
| Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah   | Luas lahan bersertifikat (%)   | 81            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Penyelesaian kasus tanah negara (%)  | 100           | Sekretariat Daerah                         |
|  | Kepemilikan KTP (%)  | 77            | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil       |
|  | Persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga (%)                     | 100           | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil       |
|  | Kepemilikan akte kelahiran(%)  | 29            | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil       |
|  | Persentase SKPD yang memiliki SPM (%)*                                     | 69            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tupoksi (%)*                      | 69            | Sekretariat Daerah                         |
| Meningkatnya pemenuhan Produk Hukum Daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah | Persentase Raperda yang menjadi Perda (%)                                  | 68            | Sekretariat DPRD                           |
|  | Persentase Peraturan Bupati yang diterbitkan (%)                           | 68            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Persentase Penerbitan SK Bupati (%)  | 61            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Persentase Penerbitan Instruksi Bupati (%)*                                | 50            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Persentase jumlah Perda yang ditetapkan dibanding Perda yang diajukan (%)* | 54            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum (Jumlah Kasus)     | 22            | Sekretariat Daerah                         |
| Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian  | Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP (%)         | 80/95         | Inspektorat Daerah                         |
| Meningkatnya kualitas data dan informasi   | Rasio SKPD yang akses ke jaringan internet (%)                             | 22,22         | Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan |
|  | Rasio kecamatan yang akses ke jaringan internet (%)                        | 19,05         | Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan |
|  | Website milik pemerintah daerah (%)  | 69            | Sekretariat Daerah                         |
|  | Jumlah pameran/expo  | 6             | Sekretariat Daerah                         |

| SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | SKPD PANAGGUNG JAWAB                 |
|---|--|--------|--------------------------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                                    |
| Meningkatnya perencanaan pembangunan partisipatif | Persentase aparat Bappeda yang mengikuti pelatihan perencanaan (%) | 55     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| PEJABAT     | PARAF |
|-------------|-------|
| SEKDA       |       |
| ASISTEN II  |       |
| KA. BAPPEDA |       |
| KABAG HUKUM |       |
|             |       |

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN